LAMPIRAN
LAPORAN TAHUNAN KPK 2018

DIREKTORAT PEMBINAAN JARINGAN KERJA ANTAR KOMISI DAN INSTANSI

PEMBINAAN JARINGAN DAN KERJASAMA

I. NOTA KESEPAHAMAN (MoU)

NO	MITRA	KETERANGAN
1.	Komisi Yudisial	Kerja Sama tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menjaga, Menegakan Kehormatan, Keluhuran Martabat, serta Perilaku Hakim yang ditanda tangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan dan Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum. tertanggal 13 Juli 2018 dengan nomor 203 Tahun 2018 dan nomor 16/KL.01.03/07/2018 dengan ruang lingkup : a. Pertukaran Data dan Informasi b. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi c. Pendidikan, Pelatihan dan Sosialisasi d. Kajian dan Penelitian e. Narasumber dan Tenaga Ahli
2.	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	Kerja Sama tentang Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditanda tangani oleh Agus Rahardjo dan Abdul Haris Semendawai tertanggal 17 April 2018 dengan nomor 177/2018 dan Perj-2.005/1.2.2.1/ LPSK/4/2018 dengan ruang lingkup : a. Perlindungan saksi b. Penerapan dan Peningkatan Kepatuhan LHKPN c. Pemetaan Titik Rawan Gratifikasi dan Penerapan Program Pengendalian Gratifikasi d. Pendidikan dan Sosialisasi Anti Korupsi yang terkait dengan Perlindungan Saksi; dan e. Lingkup lainnya sesuai kesepaktan Para Pihak

II. KERJA SAMA MULTILATERAL

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
1	United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)	Pada tahun 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku focal point Indonesia untuk review UNCAC telah melaksanakan berbagai pertemuan koordinasi dengan kementerian/lembaga untuk memberikan masukan kepada dokumen executive summary Indonesia. Dokumen ini berisi rangkuman dari seluruh kerangka hukum dan kelembagaan sebagai hasil review implementasi UNCAC d Indonesia termasuk praktik baik, tantangan dan kebutuhan bantuan teknis. Dokumen Executive Summary Indonesia telah selesai dan dipublikasikan di website resmi UNODC. Review putaran UNCAC yang telah berlangsung mulai tahun 2016, menghasilkan 21 rekomendasi, 14 rekomendasi diantaranya pada pencegahan dan 7 rekomendasi untuk pemulihan aset. KPK berpartisipasi aktif dalam pertemuan rutin terkait UNCAC: 1. Rangkaian pertemuan ke-9 Implementation Review Group (IRG) pada 4-6 Juni 2018 di Wina, Austria, yang dilanjutkan dengan pertemuan ke-12 Meeting of the Open Ended Intergovernmental Working Group on Asset Recovery pada 6-7 Juni 2018. 2. Rangkaian pertemuan 1st Resumed 9th Session of IRG dan the 9th Working Group on Prevention di Wina, Austria pada 3-7 September 2018. 3. Pertemuan ke-9 2nd Resumed IRG, di Wina, Austria pada 12-14 November 2018. KPK juga berpartisipasi aktif dalam pertemuan trilateral di Wina, Austria terkait peran Indonesia sebagai negara peninjau: 1. Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Honduras, Vietnam dan UNODC pada 7 Juni, 2018. 2. Pertemuan Trilateral antara Indonesia, Tanzania dan Sudan Selatan dan UNODC pada 14 November 2018. KPK bersama dengan UNODC mengadakan Diskusi Publik Paparan Hasil Reviu Putaran I dan II United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada 27 November 2018. Tujuan dari diskusi publik ini adalah untuk meninjau kembali kelanjutan dari implementasi UNCAC di Indonesia, mereview kepatuhan Indonesia terhadap pasal-pasal UNCAC dan menindaklanjuti rekomendasi UNCAC dari kedua putaran review. Kegiatan ini turut didukung oleh berbagai narasumber, yakni Menteri Hukum dan HAM, Pimpinan Komisi III DPR RI, perwakilan dari Bappenas, perwakilan dari Kementerian Luar Negeri dan perwakilan dari UNODC Regional Office for South East Asia and the Pasific (ROSEAP).

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
2	G-20	Dalam kerangka kerjasama G20 bidang antikorupsi , KPK mendorong implementasi transparansi Beneficial Ownership (BO) di Indonesia melalui kajian Analisis Kesenjangan antara Ketentuan Kepemilikan Manfaat Korporasi/Perikatan Lainnya di Indonesia dengan Standar Internasional. KPK juga memiliki peran aktif dalam menyusun kesepakatan *High-Level Principles for Preventing and Managing 'Conflict of Interest' in the Public Sector* dan *High-Level Principles for Preventing Corruption and Ensuring Integrity in State-Owned Enterprises* dalam forum G20. KPK menjadi bagian penting dari delegasi Indonesia pada G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) I di Buenos Aires, Argentina pada 27 Februari-1 Maret 2018 dan ACWG II di Paris, Prancis pada 25-30 Juni 2018. Dalam ACWG I dan II, KPK mengirimkan delegasi untuk memberikan kontribusi aktifnya, terutama untuk mengukuhkan komitmen negara anggota G20 dalam mencegah dan memberantas korupsi. Pertemuan ACWG I membahas salah satunya mengenai rencana kerja tahunan Presidensi Argentina untuk G20 ACWG 2018, penentuan High Level Principles yang akan dibahas di tahun 2018 dan metodologi kerja ACWG. Pada pertemuan ini, diadakan side event dengan tema *"Curtailing Corruption and Promoting Integrity in State-owned Enterprises"*. Salah satu hal yang disampaikan Indonesia dalam pertemuan ACWG II adalah masukan terhadap draft dokumen High Level Principles dan Rencana Aksi 2019-2021 G20 ACWG yang diselaraskan dengan kebutuhan dan kepentingan nasional Indonesia, serta menyampaikan intervensi dan pandangan pada sejumlah isu penting, seperti pada sesi Corruption and Gender dimana delegasi Indonesia menyampaikan tentang capaian KPK lewat program Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK).

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
3	APEC	Peran penting KPK terkait APEC pada 2018 adalah dengan berkontribusi aktif dalam pertemuan rutin APEC: √ APEC *Anti-Corruption and Transparency Experts Working Group* (ACTWG) Meeting I pada 25 – 26 Februari, 2018 √ APEC *Anti-Corruption and Transparency Working Group* (ACTWG) dan APEC *Anti-Corruption Network* (ACTNET) pada 5-7 Agustus 2018. Keduanya dilaksanakan di Port Moresby, Papua Nugini. Dalam setiap pertemuan ACTWG ini, delegasi Indonesia menyampaikan perkembangan capaian terkait program pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pertemuan ACTWG I diawali dengan diadakan APEC Best Fit Practices and Experience Sharing Workshop on Corruption Prevention Mechanisms. Di pertemuan ini, KPK berpartisipasi aktif dalam pembahasan mengenai ACTWG Workplan 2018 dan perubahan ACTWG Multi-Year Strategic Plan 2013 – 2020. Pada rangkaian kegiatan ACTWG III di Papua Nugini, KPK menyampaikan best practice penanganan kasus tindak pidana korupsi dan pencucian uang, menyampaikan paparan mengenai hasil reviu putaran II UNCAC serta menyampaikan tindaklanjut Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies (Jakarta Principles). KPK juga berpartisipasi aktif dalam diskusi terkait kesepakatan APEC baik di ACWG maupun ACTNET.
4	International Anti–Corruption Academy (IACA)	Pada tahun 2018, KPK menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam pertemuan ke-7 Assembly of Parties (AoP) International Anti-Corruption Academy (IACA) di Wina, Austria pada 27-28 September 2018. Indonesia merupakan salah satu founding members IACA dan tercatat sebagai Negara Pihak ke-49 pada Persetujuan Pendirian IACA. Pada pertemuan ini, delegasi Indonesia menyampaikan pandangan Indonesia bahwa pendidikan anti korupsi merupakan salah satu instrumen utama dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. KPK juga mengadakan pertemuan bilateral dengan IACA di sela-sela pertemuan AoP, untuk membahas kemungkinan penjajakan kerjasama antara Pusat Edukasi Anti Korupsi (ACLC) KPK dan IACA. Pertemuan ini membahas potensi kerjasama dalam bentuk tailor made training untuk pegawai KPK dan kerjasama terkait program akademik master bidang anti korupsi (IMACS). Program IMACS merupakan program master satu-satunya di dunia yang mempelajari isu anti korupsi secara holistik. Selain itu, KPK juga melakukan kunjungan ke kampus IACA di Laxenburg, Austria.

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
5	South East Asia Parties Against Corruption (SEA-PAC)	KPK menyampaikan inisiatif untuk melaksanakan pelatihan bersama negara anggota SEA-PAC melalui Concept Notes of Capacity Building Stocktaking Programme dalam SEA-PAC Secretariat meeting di Manila, Filipina pada Juli 2018. KPK menyebarkan kuesioner kepada negara anggota SEA-PAC untuk mengidentifikasi isu bersama yang dihadapi oleh lembaga anti korupsi di Asia Tenggara. Jawaban kuesioner tersebut kemudian dianalisis untuk menjadi tema dalam kegiatan pelatihan bersama negara anggota SEA-PAC. KPK juga berkontribusi aktif dalam dua pertemuan rutin SEA-PAC yakni: √ The 14th SEA-PAC Secretariat Meeting yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada tanggal 17-20 Juli 2018. √ The 14th SEA-PAC Principals Meeting yang diselenggarakan di Singapura pada 29-31 Oktober 2018. Pada pertemuan Principals *Meeting, disepakati dokumen Terms of Reference for Cooperation of Parties to the Memorandum of Understanding of the SEA-PAC,* sebagai salah satu bentuk implementasi dari MoU SEA-PAC. Selain itu hasil laporan analisis Capacity Building Stocktaking Programme oleh KPK disetujui oleh seluruh negara anggota SEA-PAC dan akan dijadikan dasar penentuan tema pelatihan bersama tahun 2019
6	Open Government Partnership (OGP)	5th Open Government partnership (OGP) berlangsung pada 16-19 Juli 2018 di Tbilisi, Georgia dimana KPK menjadi bagian dari delegasi Indonesia. OGP Global Summit dihadiri pemerintah, parlemen, organisasi internasional dan perwakilan masyarakat sipil. Pertemuan diadakan setiap dua tahun sekali dan diselingi oleh pertemuan regional masing-masing kawasan. OGP merupakan gerakan internasional yang diprakarsai oleh 8 (delapan) negara yakni Afrika Selatan, Amerika Serikat, Brasil, Filipina, Indonesia, Inggris, Meksiko dan Norwegia pada September 2011. Indonesia memegang peranan aktif sebagai *steering committee*. Pimpinan KPK menjadi salah satu panelis pada sesi *"The challenges and successes of National Anti-Corruption Systems"* dan memaparkan capaian dan pengalaman KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Terkait tema pencegahan korupsi, Indonesia menyampaikan gagasan implementasi transparansi *Beneficial Ownership* yang sudah dituangkan dalam Peraturan Presiden No 13 tahun 2018 tentang Prinsip-Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Koorporasi

NO	KEGIATAN	DESKRIPSI
7	International Anti Corruption Conference (IACC) dan International Corruption Hunters Alliance Network (ICHA)	KPK menjadi bagian dari delegasi Indonesia dalam rangkaian pertemuan 18th International Anti Corruption Conference (IACC) dan 4th Bienniale Meeting of International Corruption Hunters Alliance Network (ICHA). IACC diadakan pada 22-24 Oktober 2018 dan ICHA diadakan pada 25-26 Oktober 2018, keduanya diadakan di Copenhagen, Denmark. 18th *International Anti Corruption Conference* (IACC) Pertemuan ini merpakan pertemuan tingkat tinggi yang dihadiri oleh menteri, pemimpin organisasi internasional, dan perusahaan swasta untuk membahas strategi kolaborasi internasional mengenai antikorupsi. Para peserta menyampaikan rencana aksi dan komitmen anti-korupsi yang konkrit, serta meyepakati pernyataan bersama untuk upaya anti-korupsi global. Pada kegiatan ini Pimpinan KPK menyampaikan capaian Indonesia dalam pemberantasan korupsi, termasuk mengenai rencana aksi pemberantasan korupsi Indonesia ke depan. Terdapat lebih dari 35 sesi workshop saat IACC. Delegasi KPK menjadi pembicara dalam beberapa sesi workshop. Pada pertemuan ini, KPK menyelenggarakan workshop "New Impetus of Anti-Corruption Agencies: UNCAC, Jakarta Principles, and beyond". 4th *Bienniale Meeting of International Corruption Hunters Alliance Network* (ICHA) Pertemuan World Bank-International Corruption Hunters Alliance (ICHA) bertujuan untuk mendorong kerjasama yang kuat antara otoritas nasional dan lembaga internasional dalam pemberantasan korupsi. Acara ini mempertemukan para pejabat senior, kepala lembaga anti korupsi, Jaksa, dan pihak berwenang lainnya yang berasal dari Afrika, Amerika Selatan, Eropa, dan Asia. Pertemuan ini juga bertujuan menyediakan kesempatan bagi para anggota ICHA untuk mendiskusikan isu-isu penting dalam upaya pemberantasan korupsi serta penguatan jaringan antar lembaga yang kuat. Pimpinan KPK memberikan paparan mengenai mekanisme perlindungan saksi dan korban pada kasus tindak pidana korupsi di Indonesia pada sesi *"Encouraging Reporting through Whistleblower Systems and Protections."*
8	Global Expert Group Meeting (EGM) on Jakarta Principles	KPK berpartisipasi aktif pada pertemuan para ahli untuk mengembangkan *"Commentary on the Jakarta Statement on Principles for Anti Corruption Agencies",* yang bertujuan untuk mendiskusikan mengenai maksud dari 16 prinsip dalam Jakarta Principles. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan COSP UNCAC 2017, dimana KPK bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, berhasil memasukkan usulan untuk memberikan mandat kepada UNODC mengembangkan panduan teknis pelaksanaan Pasal 6 UNCAC pada Resolusi 7/6 tentang Marrakech Declaration on the Prevention of Corruption. Pimpinan KPK memegang peran penting sebagai moderator dalam sesi 1 " *Setting the stage: Jakarta Principles in theory and practice".*

III. KERJA SAMA NASIONAL

NO	MITRA	KETERANGAN
1.	Kementerian Keuangan	Kerja sama Pelaksanaan Lelang Barang sitaan, Rampasan Negara, Dan Gratifikasi, ditandantangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada tgl. 14 Maret 2018 Nomor: MOU-7/MK.06/208-Nomor : 131 Tahun 2018 Ruang lingkup: (1) Koordinasi dan kerja sama dalam rangka percepatan pelaksanaan lelang Barang Sitaan, Rampasan Negara, dan Barang Gratifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; (2) Optimalisasi penuntasan proses penegakan hokum dan pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi dan pencucian uang melalui pelaksanaan lelang barang sitaan, rampasan negara, dan gratifikasi yang berbeda dalam pengelolaan KPK.
2.	Sekolah Tinggi Teologi Gereja Methodist Indonesia	Kerja sama dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Gereja Methodist Indonesia Dr. Sahat M. Lumban Tobing, M.Th pada tgl. 15 Maret 2018 Nomor: 133 Tahun 2018 - Nomor: 1300/K-STT/GMII/III/2018 Ruang lingkup: 1) Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi; 2) Pengkajian dan Penelitian; 3) Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Narasumber; dan 5) Lingkup lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
3.	Kemenkumham	Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna Laoly pada tgl. 5 Juli 2018 Nomor : 199 tahun 2018 - Nomor : M.HH-06.HH.05.05 Tahun 2018 Ruang lingkup: 1) Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2) Pertukaran Informasi dan Data; 3) Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana; 4) Penyimpanan Benda Sitaan dan/atau Barang Rampasan Negara 5) Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan dan Penempatan Tahanan dan Narapidana; 6) Peningkatan Layanan dalam Permintaan Keterangan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (Justice Collaborator); 7) Pencgahan Tindak Pidana Korupsi; 8) Pelaksanaan dan Penerapan Hasil Kajian/Penelitian; 9) Penyediaan Personil dan Narasumber/Tenaga Ahli; dan 10) Pencegahan atau Penangkalan Keimigrasian

NO	MITRA	KETERANGAN
4.	Kodam Jaya	Addendum Kedua Perjanjian Kerja Sama tentang Pinjam Pakai Sebagian Tanah Dan/Atau Bangunan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat cq Komando Daerah Militer Jakarta/Jayakarta Sebagai Rumah Tahanan Negara Komisi Pemberantasan Korupsi, ditandatangani oleh Plt. Sekretaris Jenderal KPK Pahala Nainggolan dan Asisten Logistik Kasdam Jaya Tri Hascaryo, S.I.P pada tgl. 19 Juli 2018 Nomor: SPJ-71/50/09/2012 - Nomor: B/8/PK/IX/2012
5.	PT. Pegadaian (Persero)	Kerja sama dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ditandatangani oleh Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Direktur Utama PT. Pegadaian (Persero) Sunarso pada tgl. 6 Agustus 2018 Nomor: 204 TAHUN 2018 - Nomor: 535/00013.01/2018 Ruang lingkup: 1) Implementasi Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; 2) Implementasi Pengendalian Gratifikasi; 3) Sosialisasi Anti Korupsi; 4) Kerjasama Penyimpanan Barang Gratifikasi; 5) Kerjasama Dukungan Tenaga Ahli: 6) Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan 7) Pertukaran data dan/atau informasi; dan 8) Kegiatan lain berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi yang disepakati oleh PARA PIHAK.
6.	Universitas Mahendradatta, Bali	Kerja sama dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor Universitas Mahendradatta Putri Anggraeni pada tgl. 14 Agustus 2018 Nomor: 204.1 Tahun 2018 - Nomor: 002/MoU/Rek-UM/1822/VII/2018 Ruang lingkup: 1) Pendidikan dan Pelatihan Anti Korupsi; 2) Pengkajian dan Penelitian; 3) Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Narasumber dan Ahli; dan 5) Lingkup lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
7.	Universitas Muhammadiyah Surabaya	Kerja sama dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya Dr. dr. Sukadiono, M.M pada tgl. 27 Agustus 2018 Nomor: 218 Tahun 2018 - Nomor: 0686/MoU/II.3.AU/A/2018 Ruang lingkup: 1) Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi; 2) Pengkajian dan Penelitian; 3) Pengabdian kepada Masyarakat; 4) Narasumber; dan 5) Lingkup lainnya sesuai kesepakatan Para Pihak

NO	MITRA	KETERANGAN
8.	LPP TVRI	Kerja sama dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama LPP TVRI Helmi Yahya pada tgl. 18 September 2018 Nomor: 299 Tahun 2018 - Nomor: 24/MoU/I.1/TVRI/2018 Ruang lingkup: 1) Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi; 2) Program dan Materi Antikorupsi; 3) Penguatan tata kelola dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG); dan 4) Lingkup lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
9.	Perpanjangan LPP RRI	Kerja sama dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, ditandatangani oleh Ketua KPK Agus Rahardjo dan Direktur Utama LPP RRI Mohammad Rohanudin, S.Sos pada tgl. 18 September 2018 Nomor: 299 Tahun 2018 - Nomor: 24/MoU/I.1/TVRI/2018 Ruang lingkup: 1) Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi; 2) Program dan Materi Antikorupsi; 3) Penguatan tata kelola dalam rangka penerapan Good Corporate Governance (GCG); dan 4) Lingkup lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
10.	Kemenkeu (Proses Pembahasan)	Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lainnya Ruang lingkup: 1) Pertukaran Informasi dan Data; 2) Pengelolaan Barang Milik Negara, Benda Sitaan, Barang Rampasan, dan/atau Barang Grattifikasi; 3) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; 4) Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia; 5) Kajian/Penelitain; 6) Penyediaan Personil, narasumber, tenaga ahli serta dukungan sarana dan prasarana, dan 7) Layanan Pengadaan
11.	PP Muhammadiyah (Proses Pembahasan)	Tentang Kerja Sama Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Ruang Lingkup: 1) Pendiidikan dan Pelatihan Anti Korupsi; 2) Pengkajian; 3) Pembangunan Budaya Antikorupsi/Integritas 4) Narasumber; dan 5) Lingkup lainnnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK

NO	MITRA	KETERANGAN
12.	BKPM (Proses Pembahasan)	Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lainnya Ruang lingkup: 1) Pertukaran Informasi dan Data; 2) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; 3) Pendidikan dan Pelatihan; 4) Kajian/Penelitian; 5) Penyediaan Personil dan Narasumber/Tenaga Ahli; 6) Kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13.	BPJS Ketenagakerjaan (Proses Pembahasan)	Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Tindak Pidana Lainnya Ruang lingkup: 1) Pertukaran Data dan Informasi; 2) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi; 3) Pendidikan, Pelatihan, dan Sosialisasi; 4) Kajian dan Penelitian; 5) Narasumber; dan 6) Lingkup lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK

IV. DUKUNGAN PEMBERANTASAN TPK

1.	Seminar 'Pemetaan dan Penguatan Advokasi Korupsi di Sektor SDA serta PBJ Pemerintah' dan 'Konsolidasi Masyarakat Sipil Regional Barat' Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan	Padang, Sumatera Barat 08-10 Januari 2018
2.	Seminar 'Pemetaan dan Penguatan Advokasi Korupsi di Sektor SDA serta PBJ Pemerintah' dan 'Konsolidasi Masyarakat Sipil Regional Timur' yang diselenggarakan oleh TII, ACC Sulawesi, FIK Ornop Sulsel, dan Walhi Sulsel di Kota Makassar, Sulawesi Selatan	22-24 Januari 2018
3.	Audiensi CSO bidang SDA dengan Pimpinan	22 Januari 2018
	Konsolidasi CSO multi bidang	01 Februari 2018
	FGD Expert Meeting RUU KUHP (Bandung) – MSI CEGAH	5-6 Juli 2018
	FGD Expert Meeting RUU KUHP (Medan) – MSI CEGAH	9-10 Juli 2018
	FGD Expert Meeting RUU KUHP (Bali) – MSI CEGAH	15-16 Agustus 2018

V. IMPLEMENTASI KERJA SAMA

1.	Workshop Pengembangan JAGA	05 Maret 2018
2.	FGD "Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan"	19 Maret 2018
3.	Rekomendasi Hasil FGD Kendaraan Bermotor Listrik kepada Presiden	06 April 2018
4.	FGD "Backstopping" dengan YLBHI dari 8 Provinsi (Surabaya)	05 April 2018
5.	FGD "Backstopping" dengan YLBHI dari 7 Provinsi (Palembang)	11 April 2018
6.	FGD Sumber Daya Alam dengan CSO : JATAM dan AMAN	30-31 Mei 2018

7.	Diskusi Terbatas untuk Menentukan Rencana Tindak Lanjut Hasil FGD "Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Untuk Transportasi Jalan"	05 September 2018
8.	Sharing knowledge BPS "Pemanfaatan Data BPS melalui Web Application Programming Interface (Web-API)	18 Oktober 2018
9.	Penyelenggaraan Anti-Corruption Summit	Makassar, 22-24 Oktober 2018
10.	FGD "Bus Listrik" di UI	22 November 2018

VI.PEREKAMAN SIDANG

No.	Nama Kegiatan	Lokasi Kegiatan
1.	Bedah Kasus / Kajian Perkara Hasil Pemanfaatan Rekam Sidang di 10 Perguruan Tinggi Mitra Perekaman Sidang KPK	Universitas Syiah Kuala, Universitas Jambi, Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Diponegoro, Universitas Airlangga, Universitas Tanjungpura, Universitas Nusa Cendana, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Pattimura dan Universitas Cenderawasih
2.	National Anti-Corruption Moot Court Competition Piala Bergilir KPK Tahun 2018 dengan 10 Peserta Perguruan Tinggi dari Seluruh Indonesia	Universitas Syiah Kuala
3.	Membuat Ringkasan Analisa Hukum dengan Metode IRAC (Issue, Rule/Regulation, Analysis, and Conclusion) untuk 33 Perguruan Tinggi Mitra Kerja Perekaman Sidang KPK	33 Perguruan Tinggi Mitra Kerja Perekaman Sidang KPK

VII. KERJA SAMA PEREKAMAN SIDANG

No.	Nama Kegiatan	Keterangan
1.	Pelaksanaan Perekaman Sidang Tipikor Pada 33 Pengadilan Negeri Tipikor di Indonesia melalui 33 Perguruan Tinggi Mitra Kerja KPK	Berdasarkan Jenis Perkara : Perkara Kejaksaan 75 Perkara Perkara KPK 129 Perkara Perdata 3 Perkara Peninjauan Kembali 19 Perkara TUN 2 Perkara Pra Peradilan 24 Perkara Jumlah Perkara direkam sebanyak 252 Perkara
2.	Penguatan Jaringan Pemantau Peradilan Bersama dengan Komisi Yudisial Republik Indonesia dengan mengangkat tema FGD terkait RUU Tipikor dan RUU Jabatan Hakim	Dilaksanakan di 6 Kota yang diantaranya Semarang, Kupang, Ambon, Pontianak, Manado dan Surabaya
3.	Pelaksanaan Evaluasi Perekaman Sidang Tipikor dan FGD terkait Peradilan Bersih bersama 33 Kampus Mitra Kerja Perekaman Sidang KPK dan Komisi Yudisial serta Mahkamah Agung	Dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat